

RINGKASAN

**Mujiburrahman Al Asyi Penyelesaian Sengketa Akibat Perbuatan Melawan
Hukum Pemilik Ternak Yang Menimbulkan Kerugian
(Gampong Paloh Lada Kecamatan Dewantara
Kabupaten Aceh Utara)**

(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. dan Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemilik ternak merupakan suatu konflik yang sering terjadi di suatu wilayah pedesaan, terutama desa yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat gampong. Salah satu bentuk sengketa yang terjadi adalah penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum yang disebabkan hewan yang berkeliaran secara liar tanpa adanya pengawasan oleh pemilik ternak yang menyebabkan beberapa permasalahan di lingkungan gampong Paloh Lada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian serta bentuk kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa akibat perbuatan melawan hukum pemilik ternak yang menimbulkan kerugian di gampong Paloh Lada.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan Undang-Undang yang berlaku dan mengaitkannya dengan fakta-fakta di lapangan. Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), analisis data menggunakan tahap pengumpulan data dengan cara wawancara yang dilakukan kepada aparatur desa, reduksi data, penyajian data dan tahap penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan melalui jalur non-litigasi, yaitu melalui mekanisme adat gampong sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dalam proses ini, aparatur gampong seperti keuchik, tuha peut, dan tokoh adat berperan sebagai mediator yang netral. Kendala dalam penyelesaian sengketa meliputi beberapa aspek, yaitu rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam mengawasi ternak, kesulitan dalam menentukan besaran ganti rugi, keterbatasan ekonomi pemilik ternak, belum adanya aturan tertulis di tingkat gampong, serta faktor hubungan sosial yang mempengaruhi keberanian pihak korban dalam menuntut haknya. Selain itu, dilakukan pula upaya preventif berupa pengawasan terhadap ternak dan pelibatan tokoh agama serta tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman nilai-nilai tanggung jawab dan keadilan.

Diharapkan kepada aparatur desa agar terus meningkatkan perannya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat melalui mekanisme musyawarah dan perdamaian. Pemilik ternak juga meningkatkan pengawasan terhadap hewan ternaknya dan menyediakan kandang yang memadai agar ternak tidak berkeliaran dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain.

Kata Kunci: Sengketa. Perbuatan Melawan Hukum, Proses Penyelesaian

SUMMARY

Mujiburrahman Al Asyi

**Dispute Resolution Due to Acts of Resistance
The Law of Livestock Owners Who Cause
Losses (Paloh Lada Village, Dewantara
District Kabupaten Aceh Utara)**

(Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum. and Dr. Herinawati, S.H., M.Hum)

Disputes due to unlawful acts committed by livestock owners are a conflict that often occurs in a rural area, especially villages that still uphold village traditional values. One form of dispute that occurs is the settlement of disputes due to unlawful acts caused by animals that roam wildly without supervision by livestock owners which causes several problems in the Paloh Lada village environment.

This study aims to find out the dispute resolution process due to the unlawful acts of livestock owners that cause losses as well as the forms of obstacles faced and efforts made in the dispute resolution process due to the unlawful acts of livestock owners that cause losses in village Paloh Lada.

The type of research that the author uses in this study is empirical juridical research using the applicable case study and law approach and relating it to facts in the field. In collecting data related to the research object, the author uses a field research method (*field research*), data analysis uses the data collection stage by means of interviews conducted with village officials, data reduction, data presentation and conclusion drawing stages.

The results of the study show that dispute resolution is carried out through non-litigation channels, namely through the gampong customary mechanism in accordance with Qanun Aceh Number 9 of 2008 concerning the Development of Customary and Customary Lives. In this process, village officials such as head of village, *tuha peut*, and traditional leaders play the role of neutral mediators. Obstacles in dispute resolution include several aspects, namely low legal awareness of the community in supervising livestock, difficulties in determining the amount of compensation, economic limitations of livestock owners, the absence of written rules at the gampong level, and social relations factors that affect the courage of the victim in demanding his rights. In addition, preventive efforts are also carried out in the form of supervision of livestock and the involvement of religious leaders and community leaders in providing an understanding of the values of responsibility and justice.

It is hoped that village officials will continue to increase their role in resolving disputes that occur in the community through deliberation and peace mechanisms. Livestock owners also increase supervision of their livestock and provide adequate cages so that livestock do not roam and cause losses to other communities.

Keywords: Disputes. Unlawful Acts, Settlement Process